



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SABTU, 16 MARET 2013



DAFTAR ISI

PLN	1
Pelabuhan Sorong	2
Kereta Api	3 - 4
Perkebunan Sawit	5
Infrastruktur Riau	6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PLN Gaet Transgasindo	<div><div>- PT. PLN (Persero) akan menggunakan pipa milik PT.Trans Gas Indonesia (Transgasindo) untuk mengalirkan gas dari Join operation body (JOB) Jambi Merang menuju pusat listrik duri</div><div>- Listrik dari pembangkit di Duri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Riau. Nantinya, listrik tersebut juga akan di alirkan ke wilayah Sumatera bagian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat</div><div>- PLN juga akan membangun tempat penyimpanan gas berupa compression natural gas (CNG) di Duri</div></div>				PT. PLN (persero) PT. Trans Gas Indonesia (Transgasindo)	

► DISTRIBUSI GAS

PLN Gaet Transgasindo

JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menggunakan pipa milik PT Trans Gas Indonesia (Transgasindo) untuk mengalirkan gas dari *joint operation body* (JOB) Jambi Merang menuju pusat listrik Duri.

Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan nantinya akan ada sekitar 35 juta kaki kubik per hari (MMscfd) yang dialirkan dari JOB Jambi Merang ke pusat listrik Duri melalui pipa sepanjang 230 kilometer milik Transgasindo. Pasokan gas itu akan menolong pasokan listrik di Sumatra bagian utara yang saat ini pasasan.

“Di Medan ada permintaan pasokan listrik yang cukup besar dan belum terlayani. Oleh karena itu, kami ingin membangun pembangkit listrik sedekat mungkin dengan Medan, seperti di wilayah Duri. Listrik dari pembangkit itu nantinya tinggal dialirkan melalui transmisi ke Medan,” katanya, Jumat (15/3).

Nur memastikan listrik dari pembangkit di Duri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Riau. Nantinya, listrik tersebut juga akan di alirkan ke wilayah Sumatra bagian utara lainnya, untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat.

Saat ini, Nur Pamudji telah menanda-

tangani gas transportation agreement (GTA) dengan Transgasindo yang diwakili oleh Arsyad Rangkuti sebagai Presiden Direktur Transgasindo dan Arief Transaindra Kushermawan sebagai Director of Business Development Transgasindo.

Nur mengungkapkan PLN juga akan membangun tempat penyimpanan gas berupa *compression natural gas* (CNG) di Duri. “Nantinya akan seperti CNG di Palembang, gas yang hanya 3 MMscfd secara berkelanjutan akan disimpan dan digunakan ketika beban puncak untuk membangkitkan pusat listrik dengan kapasitas 50 megawatt,” ungkapnya.

Kepala Divisi Gas dan BBM PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan dalam GTA yang ditandatangani itu nantinya PLN akan membayar US\$0,047 per MMscfd. Gas yang dialirkan melalui pipa milik Transgasindo itu juga nantinya akan digunakan untuk pusat listrik dengan kapasitas 20 MW.

Ke depannya, lanjut Suryadi, PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga mikro gas (PLTMG) dengan kapasitas 110 MW. Selain itu, PLN juga akan membangun CNG untuk menempatkan gas sebesar 4 MMscfd di pusat listrik Duri.

(Lili Sunardi)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelabuhan Sorong Pembangunan Terhambat Hutan Lindung	<div>- Pembangunan pelabuhan Sorong terhadap karena kawasannya merupakan merupakan wilayah hutan lindung</div> <div>- Untuk mengatasi kendala itu, perlu keputusan presiden buat mempercepat turunnya izin</div> <div>- Pelindo II berupaya mengajukan permintaan pembebasan kawasan hutan lindung Pulau Teleme</div>	2014			PT. Pelindo II	

PELABUHAN SORONG

Pembangunan Terhambat Hutan Lindung

SORONG, KOMPAS — Pelabuhan Sorong di Papua Barat belum bisa dibangun karena belum memperoleh izin. Pembangunan pelabuhan itu terhadap karena sebagian kawasannya merupakan wilayah hutan lindung.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation RJ Lino, Jumat (15/3), di Sorong, mengatakan, pembangunan Pelabuhan Sorong awalnya ditargetkan mulai 2012. Namun, karena belum adanya izin dari Kementerian Perhubungan, rencana pembangunan mundur. Pengoperasian Pelabuhan Sorong juga akan mundur, menjadi tahun 2014, dari sebelumnya ditargetkan tahun ini.

"Kalau izin keluar, kami lang-

sung proses membangun," ujar Lino. Untuk mengatasi kendala itu, perlu keputusan presiden buat mempercepat turunnya izin. Hal ini telah dibahas dengan Wakil Presiden Boediono, dan keputusan presiden segera turun.

Salah satu yang perlu direvisi dalam keputusan presiden itu adalah kewajiban tender menjadi penunjukan langsung. Metode penunjukan langsung dilakukan pula pada pembangunan Pelabuhan Kalibaru.

Pelabuhan Sorong akan dibangun seluas 17 hektar di Pulau Teleme, Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Pulau seluas 150 hektar itu masih berstatus hutan lindung. Lokasi ini berjarak sekitar 100 kilometer dari Sorong.

Pulau Teleme dinilai tepat se-

bagai lokasi pelabuhan baru, antara lain, karena panjang pantainya mencapai 3 km. Dalam jangka panjang, pelabuhan itu bisa dikembangkan lagi.

Ketua Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan PT Pelindo II di Sorong Zuhri Iryansyah menuturkan, persiapan pembangunan pelabuhan itu telah selesai. Analisis mengenai dampak lingkungan telah dibahas di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan rancangan master (masterplan) juga telah sampai di Kementerian Perhubungan. "Semua terhenti sebab status daerah itu hutan lindung," katanya. PT Pelindo II berupaya mengajukan permintaan pembebasan kawasan hutan lindung Pulau Teleme itu. (IRE)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalur KA Ganda Layang Dibangun 2014	<div>- Jalur ganda layang tersebut dibutuhkan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas dan penurunan tanah yang semakin parah</div> <div>- Dengan hadirnya jalur ganda di antara posisi Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang juga akan dibangun jalur rel lintas atas dengan bangunan lama yang tetap dipertahankan sebagai bangunan warisan budaya</div>	2014				Tahap pembuatan rancangan teknik secara rinci

Jalur KA Ganda Layang Dibangun 2014

SEMARANG, KOMPAS – Jalur kereta api ganda layang di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, segera dibangun pada 2014. Jalur ganda layang tersebut dibutuhkan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas dan penurunan tanah yang semakin parah di kota administratif itu.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jawa Tengah Hendy Siswanto, Jumat (15/3), menuturkan, rencana pembangunan jalur ganda layang sepanjang 8,2 kilometer itu sudah pada tahap pembuatan rancangan teknik secara rinci. Pada 1,7 tahun lagi pekerjaan fisik jalur ganda tersebut diharapkan sudah dimulai.

"Kebutuhan jalur kereta api layang sangat mendesak, terutama karena arus lalu lintas yang padat di tengah Kota Semarang. Dengan jalur KA tunggal seperti saat ini, sudah padat di pelintasan sebidang," ujar Hendy.

Di Kota Semarang saat ini ada 58 pelintasan sebidang, baik yang dijaga maupun tidak dijaga oleh penjaga pintu kereta. Padahal,



Kebutuhan jalur kereta api (KA) layang sangat mendesak, terutama karena arus lalu lintas yang padat di tengah Kota Semarang.

rata-rata 66 kereta tercatat melintas setiap hari di lintasan tersebut.

Kepadatan kota

Menurut Hendy, selain mempertimbangkan kepadatan kota, pembangunan jalur kereta ganda layang juga dilakukan karena mempertimbangkan penurunan tanah di Kota Semarang yang semakin parah. Penurunan tanah di kawasan pesisir saat ini mencapai 10,5 sentimeter per

tahun.

Nantinya, jalur ganda KA layang membentang dari Mangkang sampai Kaligawe dan kembali menurun di Stasiun Alastua. Stasiun ini akan difungsikan sebagai stasiun pusat. Selanjutnya seluruh aset di depo akan dipindahkan ke Alastua. Adapun KA barang akan dipusatkan di Stasiun Mangkang dan Stasiun Brumbung.

Dengan hadirnya jalur ganda, di antara posisi Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang juga akan dibangun jalur rel lintas atas, dengan bangunan lama yang tetap dipertahankan sebagai bangunan warisan budaya. Bangunan lama nantinya dijadikan obyek wisata dan melayani perjalanan wisata kereta.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Surono menambahkan, pembangunan jalur ganda layang itu sangat membantu kelancaran arus lalu lintas kereta api. Selama ini, perjalanan kereta api di Semarang kerap tersendat terutama jika terjadi banjir. (UTI)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Dana Perawatan Tidak Kunjung Cair	<div>- Keputusan presiden memberikan dana perawatan atau <i>infrastructure maintenance and operation</i> (IMO) tertuang dalam Peraturan Presiden No. 53 tahun 2012</div> <div>- Dana perawatan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna kereta api</div> <div>- Dana yang ada bisa dipakai untuk membeli sarana dan prasarana yang baru</div>					

KERETA API

Dana Perawatan Tidak Kunjung Cair

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun Presiden telah memutuskan memberikan dana perawatan untuk kereta api, tetapi hingga kini PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum menerima kucuran dana tersebut.

"Selama KAI dikandung badan, kami belum pernah menerima dana perawatan untuk prasarana," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignasius Jonan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jumat (15/3).

Keputusan presiden memberikan dana perawatan atau *infrastructure maintenance and operation* (IMO) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012.

Jonan mengatakan, KAI sudah mengajukan dana perawatan sebesar Rp 1,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan tahun 2013 ini. "Saya pesimis dana ini akan cair karena dana IMO tahun 2012 sebesar Rp 1,5 triliun yang sudah kami ajukan, hingga kini juga tidak cair," kata Jonan.

Jonan menegaskan dirinya tidak mengetahui alasan belum ca-

irnya dana perawatan tersebut. Bahkan, ia menegaskan, perusahaan memiliki hubungan yang harmonis dengan kementerian teknisnya.

Jonan menegaskan, dana perawatan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna kereta api. Selama ini, dana perawatan tersebut berasal dari kas internal dan pinjaman perbankan. "Utang KAI sekitar Rp 3 triliun," kata Jonan.

Sementara, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, anggaran IMO sudah diajukan kepada Menteri Keuangan. "Sebaiknya ditanyakan ke sana," kata Bambang.

Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu, persoalan ini juga menjadi salah satu yang dibahas. Hasilnya, Komisi V DPR akan membantu mendorong Kementerian Keuangan untuk segera mengucurkan dana ini," kata Bambang.

Sementara itu, pengamat perkeretaapian dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, seharusnya peme-

rintah tidak membiarkan KAI berada dalam kesulitan terus-menerus. "Sudah ada perpresnya, tinggal melaksanakan saja, tetapi kok masih tidak jalan juga," kata Djoko.

Yang harus diingat oleh pemerintah adalah dana ini bukan untuk KAI melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Jika perawatan bagus, masyarakat mendapat pelayanan yang baik, dan tarifnya juga bisa lebih murah," ujar dia.

Dana yang ada bisa dipakai untuk membeli sarana dan prasarana yang baru.

"Saat ini sarana kereta yang berusia lebih dari 30 tahun mencapai 28,71 persen. Jumlah ini sangat besar," kata Djoko.

Menurut dia, perlakuan pemerintah terhadap kereta api selalu tidak adil. Dia mencontohkan, untuk angkutan darat seperti bus, biaya perawatan jalan dibebani kepada pemerintah. Sementara kalau di kereta, biaya perawatannya dibebani ke KAI. "Padahal kereta juga mempunyai peran yang tidak kalah besar," kata dia. (ARN)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Warga Diajak Studi Banding untuk Meredam Polemik	<div>- Pemkab Pohuwato, Gorontalo, berencana mengundang wakil warga yang masih menolak areal perkebunan sawit untuk ikut studi banding melihat kondisi perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatera</div> <div>- Dengan studi banding akan menunjukan tak semua perkebunan sawit merugikan atau berdampak buruk</div>					

PERKEBUNAN SAWIT

Warga Diajak Studi Banding untuk Meredam Polemik

GORONTALO, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, berencana mengundang wakil warga yang masih menolak areal perkebunan sawit untuk ikut studi banding melihat kondisi perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatera. Tujuannya, meredam polemik antara warga yang menolak dan warga yang mendukung perkebunan sawit.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Pohuwato Djoni Nento, di Gorontalo, Jumat (15/3).

"Rencananya, Maret ini kami akan studi banding ke perusahaan sawit di Kalimantan atau Sumatera yang pengelolaannya berhasil secara ekonomi dan ramah lingkungan. Dengan studi banding ini, kami akan menunjukkan, tak semua perkebunan sawit merugikan atau berdampak buruk," ujarnya.

Menurut Djoni, pihak yang diajak adalah tokoh atau wakil war-

ga di sekitar lokasi perkebunan sawit, aparat, aktivis lingkungan, dan mahasiswa. "Studi banding ini janji kami kepada warga di sekitar lokasi kebun sawit yang pernah mendesak dihentikannya operasional perusahaan sawit," lanjutnya.

Sejauh ini, ada empat perusahaan sawit yang mulai beroperasi di Pohuwato, yaitu PT Inti Global Laksana, PT Banyan Tumbuh Lestari, PT Sawit Tiara Nusa, dan PT Sawindo Cemerlang. Luas lahan sawit yang dikelola keempat perusahaan itu mencapai 58.000 hektar. Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut merupakan kawasan hutan. Itulah sebabnya, sebagian warga menolak alih fungsi hutan menjadi kebun sawit.

Aswin Ahmad, salah seorang warga Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, yang menolak alih fungsi hutan, mengatakan silakan saja dengan tawaran studi banding tersebut. Namun, ia belum memutuskan untuk ikut.

(APO)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Rusli Zainal Siap Genjot Infrastruktur	<div>- Tujuan pembangunan yang dilakukan di Riau tidak semata-mata mengejar ketertinggalan dari daerah lain, tetapi persoalan marwah dan kehormatan masyarakat Riau</div> <div>- Beberapa proyek infrastruktur jalan, diantaranya berupa dua proyek jalan layang (fly over) dan jalan akses menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II</div>					

► PEMBANGUNAN RIAU

Rusli Zainal Siap Genjot Infrastruktur

PEKANBARU— Gubernur Riau Rusli Zainal berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur setelah meresmikan 21 megaprojek yang dibangun pada periode 2007-2012 dengan total nilai aset sekitar Rp1,1 triliun lebih.

Peresmian proyek yang dipusatkan di Venues Atletik Sport Center Rumbai tersebut berupa sarana olahraga, infrastruktur jalan, gedung, dan bangunan lainnya.

Rusli menegaskan tujuan pembangunan yang dilakukan di Riau tidak semata-mata mengejar ketertinggalan dari daerah lain, tetapi juga menyangkut persoalan marwah dan kehormatan masyarakat Riau.

"Ada 21 proyek yang diresmikan dengan nilai asetnya mencapai sekitar Rp1,1 triliun lebih," ujarnya di Pekanbaru, Kamis (14/3).

Proyek yang diresmikan tersebut terbagi dalam tiga kelompok sesuai dengan peruntukannya, yakni infrastruktur jalan, sarana olah raga, dan bangunan gedung.

Beberapa proyek infrastruktur jalan, di antaranya berupa dua proyek jalan layang (fly over) dan jalan akses menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Selanjutnya, sarana olah raga yang sudah digunakan pada PON XVIII di Riau pada September 2012, yakni hall basket, senam, gelanggang remaja, arena sepak takraw, tenis lapangan, dan lainnya.

Selain itu, juga ada beberapa sarana olah raga yang

berlokasi di lingkungan kampus, seperti panjat tebing dan baseball di Universitas Riau, serta arena panahan dan voli ruangan di Universitas Islam Riau.

Berikutnya, beberapa bangunan gedung, seperti Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Dekranasda Riau, VIP Lancang Kuning di Bandara SSK II, Masjid Al-Hidayah di lingkungan Kantor Gubernur Riau, dan Tugu Zain Titik Nol di pusat kota.

"Semua yang diresmikan hari ini bukanlah milik kita. Pembangunan yang kita lakukan hari ini kelak akan menjadi prasasti bagi anak cucu kita pada masa mendatang," tutur Rusli.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Ramli Walid menjelaskan proyek pembangunan di bidang infrastruktur tersebut hanya bagian dari mimpi besar masyarakat untuk menjadikan Riau sebagai daerah maju dan berkembang.

"Diharapkan pada masa mendatang, generasi selanjutnya bisa mempertahankan pembangunan yang sudah ada hari ini, dan bagaimana pemanfaatannya tepat guna dan tepat fungsi, serta berguna sebagaimana mestinya," katanya.

Menurutnya, memang masih ada sarana olahraga yang belum diresmikan terkait masalah piutang dengan kontraktor seperti Stadion Utama Riau dan lapangan tembak. (Purwati)